

Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Saprudin

Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 10, No. 1, Juni 2019

Halaman : 57 - 68

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

Budget Target Clarity, Accounting Control and Reporting System.

JEL classifications :

Contact Author :

saprudin545@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study are (1). Analyzing the clarity of budget targets has a positive effect on the accountability of performance of the Gorontalo district government. (2). Analyzing accounting controls has a positive effect on the accountability of the performance of Gorontalo District government. (3). Analyzing the reporting system has a positive effect on the accountability of the performance of the Gorontalo district government. Research Results Show That Clarity of Budget Objectives Has Positive and Significant Effects on Performance Accountability of Local Government Agencies. Clarity of budget targets has a positive and significant effect on the accountability of performance of regional agencies. Accounting control has a positive and significant effect because accounting controls can help improve local government transparency, especially in providing information on the activities and financial performance of local governments. In addition, accounting control seen from the budget realization report has provided information on the financial performance of the local government, because the budget realization report is clearly visible. That is, accounting controls held by the government play a role in increasing accountability for performance. The Reporting System Has Negative and Significant Effects on Performance Accountability of Local Government Agencies. The reporting system has a negative and insignificant effect because the reporting system has not been able to provide information in implementing the budget that has been set and also in the world of government.

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggung jawaban (Halim dalam Herawaty, 2012).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat di percaya. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara objektif, jujur dan transparan.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Instansi Pemerintahan kabupaten gorontalo masih banyak yang kurang baik, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) tidak bergerak disebabkan tidak adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah Gorontalo.(M.YusupAteh,2016). Menghadapi akuntabilitas mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporannya. Tercapainya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporannya akan menentukan kualitas atau kinerja dari pemerintah daerah. Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian, sistem pelaporan dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Kondisi tersebut yang mungkin terjadi di Kabupaten Gorontalo, dimana adanya pergantian kepala daerah pada Kabupaten tersebut, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil akan berbeda dari periode sebelumnya. Salah satu penyebab tidak efektifnya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Kejelasan sasaran berimplikasi pada pimpinan, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pimpinan akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran.

Dari gambaran di atas peneliti mengambil tema “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo”

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo?
- b. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo?
- c. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo?

2. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

- b. Menganalisa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
- c. Menganalisa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:15) Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Menurut M. Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain:

- a. Semuan kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- c. Dapat memotivasi karyawan.
- d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- g. Alat pendidikan bagi para manajer.

2. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah menurut tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Menurut definisi, pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana.

Dalam perusahaan, manajer atau pemilik dapat mengamati dan mengendalikan sendiri semua operasinya, baginya adalah sudah untuk mengamati usaha yang dilakukan para pegawai. Manajer dan pemilik juga memiliki hak untuk mengamati operasi yang dilakukan para pegawai. Hal ini dilakukan secara langsung mengetahui kondisi kinerja pegawai yang bekerja diperusahaannya.

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya, melalui pengukuran prestasi kerja dengan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pengendalian akuntansi mencakup semua aset dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah. Pengendalian akuntansi mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengendalikan harta perusahaan. Ada dua kategori pengendalian akuntansi, yaitu:

1. Pengendalian secara umum

Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan digolongkan menjadi:

- a. Pengendalian organisasi, dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas (*segregation of duties*) dan pemisahan tanggung jawab (*segregation of responsibility*) yang tegas.
- b. Pengendalian dokumentasi; dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, bagan air, daftar-daftar, cetakan hasil computer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi.
- c. Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, dirancang dalam computer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam sistem kerja.
- d. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian terhadap keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan personal dalam perusahaan. Teknik untuk pengendalian keamanan fisik dapat berupa alat-alat penempatan fisik yang membantu melindungi harta perusahaan, seperti; pengawasan terhadap pengasetan fisik, pengaturan lokasi, dan penerapan ala-alat pengamanan.
- e. Pengendalian keamanan data. Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan diluar supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

3. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah,2005). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP,2000) Mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang di tetapkan.

Pemerintah daerah selaku pengguna dana public harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara). Untuk itu pemerintah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Kusumaningrum (2013)

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic (LAN, 2003). Menurut Jhony Saputra (2014) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intina meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

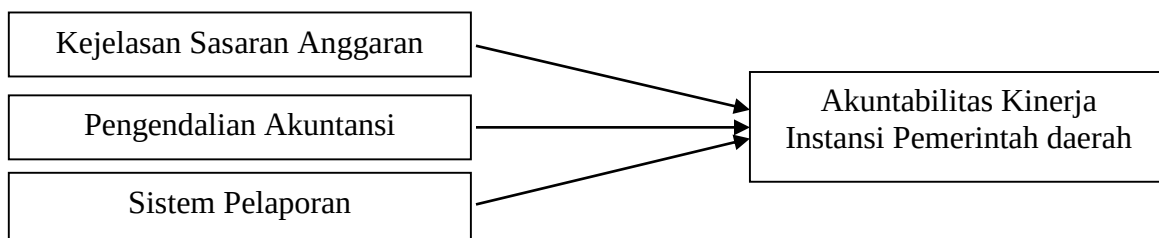
1. Penetapan perencanaan strategi
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara perkesinambungan.

Sugianto (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi merupakan salah satu syarat mutlak dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good govermance*). Prinsip-prinsip *good govermance* sebagai berikut :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan ekonomi.
2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan ekonomi dan sosial yang baik serta pertanggung jawaban keuangan yang baik.
3. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis dan pengakuan hak atas kebebasan manusia/hak azasi manusia, adanya kebebasan pers, dan kebebasan ekspresi aspirasi masyarakat.

5. Kerangka Konseptual

Hubungan antara Kejelasan Sasaran anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) yaitu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di tetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Hubungan Pengendalian Akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) yaitu pengendalian akuntansi lebih menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Hubungan Sistem Pelaporan (X3) untuk mengukur aktivitas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

6. Hipotesis

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini 33 SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan *software SPSS (Statistical Product and service solutions)*.

Data-data yang diperoleh baik berupa angka maupun yang berupa tabel, kemudian ditafsirkan dan dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Akuntabilitas Instansi
a	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi
X_1	: Kejelasan sasaran anggaran
X_2	: Pengendalian akuntansi
X_3	: Sistem pelaporan
e	: Error

E. HASIL PENELITIAN

1. Uji Reliabilitas

Hasil uji realibilitas dengan menggunakan metode *alpha cronbach's* untuk mengetahui konsistensi pengukuran variable penelitian. Hasil pengolahan dengan menggunakan software SPSS di peroleh sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Realibilitas Instrumen

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	0,732	Reliabel
Pengendalian Akuntansi (X_2)	0,701	Reliabel
Sistem Pelaporan (X_3)	0,613	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,752	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019

Dari keempat variabel yang diteliti, pengujian reliabilitas dari tabel 5.1, terlihat nilai *alpha cronbach's* rata-rata diatas 0,60 yaitu kisaran 0,613 sampai 0,752 ini berarti bahwa seluruh item pernyataan dari setiap variable yang diamati dinyatakan reliabel.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual
		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,03527695
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		,627
Asymp. Sig. (2-tailed)		,827
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan table 2, nilai signifikan sebesar 0,827 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Hal ini sesuai kriteria jika nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka distribusi data normal.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah ditemukan atau tidak korelasi diantara variabel independen.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity statistics		Keputusan
		Tolerance	VIF	
1	(constant)			
	KEJELASAN	,676	1,479	Bebas Multikol
	PENGENDALIAN	,693	1,443	Bebas Multikol
	SISTEM	,965	1,037	Bebas Multikol

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan table 3, terlihat jumlah bahwa VIF kurang dari 10, maka variabel tidak memiliki masalah multikolinearitas, dan tolerance terlihat lebih dari 0,10, maka tidak ada gejala multikolinearitas.

4. Uji Kecocokan Model Regresi dan Pengujian Hipotesis

Analisis pengujian kecocokan model regresi dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Uji awal untuk memastikan kecocokan model regresi kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah mendeteksi nilai korelasi yang disimbolkan dengan (R). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai korelasi (R) sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Kolerasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,703 ^a	,494	,469	1,060	2,162
a. Predictors: (Constant), SISTEM, PENGENDALIAN, KEJELASAN					
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS					

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0,703 yang berarti bahwa nilai korelasinya mendekati 1 atau berada pada kategori cukup kuat, berdasarkan skor tersebut, maka dapat di ketahu bahwa jika kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah akan meningkat.

Uji koefisien determinasi diperuntukkan untuk menilai perubahan nilai turunya variable akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di SKPD-SKPD Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-Square (R^2) sebesar 0,494 atau 49,4%. Hal ini memberikan informasi bahwa perubahan kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di SKPD-SKPD Kabupaten Gorontalo 49,4% dapat dijelaskan oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Sedangkan selebihnya 50,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti Kinerja Manajerial.

1. Uji t

Uji secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara parsial.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan Parsial

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,267	,027
	KEJELASAN	3,179	,002
	PENGENDALIAN	4,097	,000
	SISTEM	-,291	,772
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS			

Sumber: Data diolah, 2019.

Dari tabel 5 menunjukkan hasil uji t adalah :

- Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara parsial hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

- b. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara parsial hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.
- c. Sistem pelaporan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,772 < 0,05$ maka H_0 diterima H_3 ditolak.

2. Uji F (Fisher)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara bersama-sama.

Tabel 6. Uji Signifikan Simultan

Sumber: Data diolah, 2019.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67,924	3	22,641	20,150	,000 ^b
	Residual	69,667	62	1,124		
	Total	137,591	65			
va. Dependent Variable: AKUNTABILITAS						
b. Predictors: (Constant), SISTEM, PENGENDALIAN, KEJELASAN						

Berdasarkan tabel 6, dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Karena $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

3. Uji Regresi linier Berganda

Uji regresi linier berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5,215	2,301	
	KEJELASAN (X_1)	,413	,130	,349
	PENGENDALIAN(X_2)	,350	,085	,445
	SISTEM (X_3)	-,033	,112	-,027

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Sumber: Data Diolah, 2019.

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,215 + 0,349X_1 + 0,445X_2 - 0,027X_3$$

Dalam persamaan regresi di atas, konstanta (B) adalah sebesar 5,215 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), pengendalian akuntansi (X_2) dan sistem pelaporan (X_3) yang mempengaruhi, akuntabilitas kinerja instansi yang terjadi pada kabupaten gorontalo sebesar 5,215. Sedangkan, uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien Kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 0,349 berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah naik sebesar 0,349 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
2. Nilai koefisien pengendalian akuntansi (X_2) sebesar 0,445 berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan p engendalian akuntansi pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah naik sebesar 0,445 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
3. Nilai koefisien sistem pelaporan (X_3) sebesar -0,027 berpengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sistem pelaporan satu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menurun sebesar 0,027 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil uji penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah dikarenakan kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mngetahui sasaran anggaran, tingkat kinerja dapat dicapai, selain itu kejelasan sasaran juga dapat memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran, selanjutnya target-target yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah.
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan karena pengendalian akuntansi dapat membantu meningkatkan transparansi pemerintah daerah terutama dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah karena pada pengendalian akuntansi sifat informasi harus ada agar dapat dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan. Selain itu pengendalian akuntansi dilihat dari laporan realisasi anggaran telah memberikan informasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, karena laporan realisasi anggaran terlihat dengan jelas. Artinya, pengendalian akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.
3. Sistem Pelaporan Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sistem pelaporan berpengaruh negative dan tidak signifikan karena sistem pelaporan belum mampu memberikan informasi dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan dan juga didalam dunia pemerintahan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dengan informasi lainnya yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Anthony, 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Terjemahan. Buku Satu. Jakarta, Salemba Empat.
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta
- Bahtiar, arif dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Dharma, 2004. *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Program Pascasarjana FISIP.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen dan Mowen, 2004. *Akuntansi Manajemen*. Edisi ketujuh. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta:Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenYKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- M. Nafarin , 2012. *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Edisi kesatu , Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan dkk, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawironegoro, Darsono. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Rudianto, 2009. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: PT Refika Aditama.
- Primadona, Ilham (2010). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal*
- Rohman, Abdul. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)*. Fakultas Ekonomika Universitas DiPonegoro. *Jurnal*
- Samuel, 2008. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera. *Jurnal*

- Saputra, Jhony.2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap 29 Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Provinsi Kepulauan Riau)*, Fakultas Ekonomi UMRAH Tanjung Pinang. *Jurnal*
- Suhartono, Mochammad, 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Sejangsan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. SNA 9 Padang. *Jurnal*
- Setiawan, Eko. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Palalawan)*, Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. *Jurnal*